

KEBIJAKAN PARIWISATA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA YANG RESPONSIF DALAM WUJUD PENYEDIAAN SARANA AKSESIBILITAS BAGI WISATAWAN PENYANDANG DISABILITAS

Gandhes Kusuma Gumelar

Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tunas Pembangunan, Surakarta
gumelargandhes@gmail.com

Danarti Karsono

Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tunas Pembangunan, Surakarta
danartikarsono@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjawab dua permasalahan yaitu: (i) apakah kebijakan pariwisata di Kota Surakarta sudah memenuhi parameter aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas; dan (ii) bagaimana bentuk ideal kebijakan pariwisata bagi wisatawan penyandang disabilitas di Kota Surakarta. Pemerintah wajib mengimplementasikan asas pembangunan pariwisata dan mengakomodir kebutuhan sarana prasarana aksesibilitas wisatawan penyandang disabilitas, sehingga asas kesetaraan dapat direalisasikan. Sarana aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas di obyek wisata yang ditentukan dalam lokasi studi menjadi parameter mengukur implementasi kebijakan pariwisata Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empirik. Sumber informasi menggunakan data primer (hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan *stakeholder* pemangku kebijakan di Kota Surakarta) selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Pendekatan konseptual, digunakan untuk merumuskan bentuk ideal kebijakan pariwisata bagi wisatawan penyandang disabilitas di Kota Surakarta. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa; (i) kebijakan pariwisata di Kota Surakarta sudah memenuhi parameter aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas, namun penyediaan sarana prasarana di lapangan belum maksimal; dan (ii) bentuk ideal kebijakan pariwisata bagi wisatawan penyandang disabilitas di kota Surakarta dapat diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota yang responsif terhadap kebutuhan aksesibilitas wisatawan penyandang disabilitas

Kata Kunci: aksesibilitas, disabilitas, kebijakan pariwisata

Abstract

The purpose of this study are to answer two problems: (i) whether the tourism policy in Surakarta has met the accessibility parameters for tourists with disabilities; and (ii) what is the ideal form of tourism policy for tourists with disabilities in Surakarta. The government is obliged to implement the principle of tourism development and accommodate the accessibility needs of tourists with disabilities, so that the principle of equality can be realized. Accessibility facilities for tourists with disabilities in the tourism objects specified in the study locations are the parameters for measuring the implementation of tourism policy in Surakarta. This research is an empirical research type. Sources of information using primary data (results of interviews, observation and documentation with stakeholders in Surakarta) then carried out a qualitative analysis. A conceptual approach is used to formulate the ideal form of tourism policy for tourists with disabilities in Surakarta. The research results provide information that; (i) tourism policy in Surakarta City has met accessibility parameters for tourists with disabilities, but the provision of facilities and infrastructure in the field has not been maximal; and (ii) the ideal form of tourism policy for tourists with disabilities in the city of Surakarta can be realized in the form of a Peraturan Daerah or Peraturan Walikota that responsive to the accessibility needs of tourists with disabilities.

Keywords: Keywords: accessibility, disability, tourism policy

I. PENDAHULUAN

Sektor pariwisata memiliki peranan besar dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah maupun masyarakat. Bahkan di beberapa daerah didapati industri pariwisata mampu mengangkat daerah tersebut dari keterbelakangan dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan utama. (Oka A. Yoeti: 2008). Obyek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. (Muhammad Ridwan: 2012). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah melalui kebijakannya mengembangkan potensi obyek wisata dalam wujud pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata harus berdasarkan prinsip kesamaan, dimaksudkan agar setiap masyarakat dapat menikmati pariwisata tanpa terkecuali. (Harry Kurniawan, *et.al*, 2017).

Kebijakan pariwisata adalah rangkaian tindakan dan keputusan pemerintah dalam mengatur dan mendayagunakan komponen pariwisata. (Mukhlis Hamdi: 2014). Kebijakan pariwisata yang baik adalah mengakomodir partisipasi masyarakat. Dengan demikian kebijakan pariwisata tersebut responsif terhadap kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan salah satu unsur masyarakat yang memiliki keterbatasan.

Pemenuhan kebutuhan sarana aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas sesuai

dengan asas dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyebutkan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas: (i) manfaat; (ii) kekeluargaan; (iii) adil dan merata; (iv) keseimbangan; (v) kemandirian; (vi) kelestarian; (vii) partisipatif; (viii) berkelanjutan; (ix) demokratis; (x) kesetaraan; dan (xi) kesatuan.

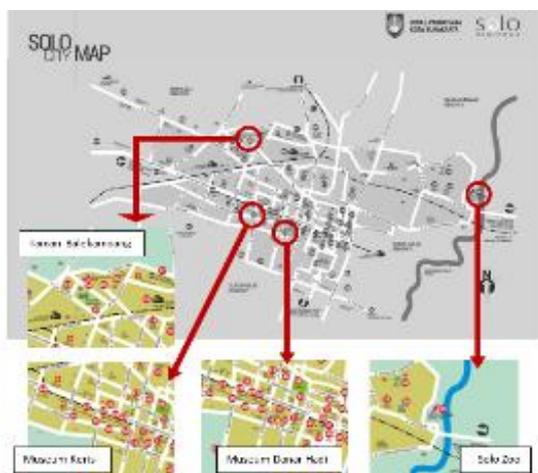
Kebijakan pariwisata adalah rangkaian tindakan dan keputusan pemerintah dalam mengatur dan mendayagunakan komponen pariwisata. (Mukhlis Hamdi: 2014). Kebijakan pariwisata yang baik adalah yang seluas-luasnya mengakomodir partisipasi masyarakat. Dengan demikian kebijakan pariwisata tersebut responsif terhadap kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan salah satu unsur masyarakat yang memiliki keterbatasan. Tugas pemerintah, dalam pembangunan pariwisata adalah mengakomodir kemudahan sarana aksesibilitas terhadap keterbatasan penyandang disabilitas untuk melaksanakan asas kesamaan dalam pembangunan pariwisata.

Difabel secara etimologis berasal dari kata *diffable* (*people with different abilities*). Masyarakat Barat menyebut penyandang disabilitas dengan istilah *disable* (tidak mampu), tetapi ada yang menyebut dengan istilah cacat (penyandang cacat). (Rina Herlina: 2017). Indonesia mengakui hak-hak penyandang disabilitas melalui ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) kedalam UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons*

with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Pasal 9 UU No. 9 Tahun 2011 menjamin penyandang disabilitas atau mereka yang memiliki disabilitas fisik, mental, intelektual atau sensorik berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak aksesibilitas. Hak ini sangat penting dalam rangka menjamin kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan.

Dasar pemikiran diatas mendorong penulis melakukan penelitian dengan parameter sarana aksesibilitas terhadap wisatawan penyandang disabilitas. Pemilihan Kota Surakarta sebagai obyek penelitian dilatarbelakangi oleh perkembangan akses sarana pariwisata di Kota Surakarta yang pesat beberapa tahun terakhir.



Gambar 1. Lokasi Penelitian
Sumber: Dinas Pariwisata Surakarta, 2020

Pariwisata Kota Surakarta dibangun melalui unsur-unsur yang menjadi ciri khasnya seperti wisata budaya, wisata kuliner dan konsistensi dalam implementasi *city branding* wisata Kota Surakarta yaitu Solo, *Spirit of Java* yang berarti pembangunan dan pengelolaan pariwisata di

Kota Surakarta dijiwai oleh nilai-nilai keluhuran dan prisma budaya Jawa.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan cara berpikir deskriptif analitik, dimana penelitian ini lebih mengarah pada implementasi kebijakan pemerintah Kota Surakarta dalam menyediakan sarana aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas. Penelitian Kualitatif memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati, serta utuh (*holistic*) karena setiap aspek dari obyek itu mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah paradigma deduktif rasionalistik, dimana penelitian deduktif menggunakan teori atau konsep sebagai acuan dalam penelitian.

Lokasi penelitian mengacu pada beberapa obyek wisata terpilih di Kota Surakarta, yaitu Taman Balekambang, Museum Keris Nusantara, Museum Batik Danar Hadi, dan Jurug Solo Zoo berdasarkan dari hasil rekomendasi Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota Surakarta, Viriani Noviasari, pada hari Senin 27 Juli 2020 pukul 13.00 WIB Lokasi studi penelitian divisualisasikan sebagai berikut:

Adapun variabel dan indikator di dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 1. Parameter dan Variabel Penelitian

PARAMETER	VARIABEL	KET
Sarana Prasarana Aksesibilitas	Ukuran Dasar Ruang	Observasi
	Jalur Pedestrian	Observasi
	Jalur Pemandu	Observasi
	Area Parkir	Observasi
	Ramp	Observasi
	Rambu dan Marka	Observasi
	Lavatory	Observasi

Batasan penelitian ini mencakup ketersediaan sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas diobyek pariwisata dalam lokasi studi pada rentang waktu Mei-Agustus 2020.

Tahapan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Tahap ini dilakukan untuk merumuskan kerangka pemikiran yang meliputi pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian.

2. Tahap Pengumpulan Data

Tahapan ini dimaksudkan untuk pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder yaitu dengan cara wawancara, penyebaran kuesioner, observasi lapangan dan dokumentasi kepada responden yang telah ditentukan.

3. Tahap Analisis

Melakukan evaluasi terhadap data primer maupun sekunder. Analisis yang digunakan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui ketersediaan sarana aksesibilitas bagi wisatawan penyandang difabilitas pada obyek wisata terpilih di Kota Surakarta.

4. Tahap Pembahasan

Pada tahap pembahasan ini menggunakan metode kualitatif. Pembahasan yang dilakukan terhadap ketersediaan sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada obyek wisata terpilih di Kota Surakarta. Hasil pembahasan yang diperoleh dapat diharapkan dapat mengetahui dan menganalisis apakah kebijakan pariwisata di Kota Surakarta sudah memenuhi parameter sarana aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas serta dapat merumuskan bentuk ideal kebijakan pariwisata bagi wisatawan penyandang disabilitas di Kota Surakarta.

5. Tahap Perumusan

Penulisan hasil dari penelitian sebagai hasil akhir yang dirangkum dalam kesimpulan. Penarikan kesimpulan disini yaitu apa saja rekomendasi untuk Pemerintah Kota Surakarta dalam merumuskan bentuk ideal kebijakan pariwisata bagi wisatawan penyandang disabilitas di Kota Surakarta.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kebijakan Pariwisata Di Kota Surakarta Ditinjau Dari Parameter Aksesibilitas Bagi Wisatawan Penyandang Disabilitas

Analisis kebijakan pariwisata di Kota Surakarta ditinjau dari parameter aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas, diklasifikasikan dalam: (i) parameter substansi aturan kebijakan; dan (ii) fakta empiris berupa empiris berupa pemenuhan indikator sarana aksesibilitas di lapangan.

Lampiran Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2026 menyebutkan pembangunan pariwisata Kota Surakarta perlu: (i) Pengembangan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang aksesibel bagi semua (*difable*); (ii) Perlunya fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang aksesibel bagi semua (*difable*); dan (iii) Adanya fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang aksesibel bagi semua (*difable*).

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota Surakarta, Viriani Noviasari mendeskripsikan bahwa pemenuhan sarana aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas telah dilakukan secara masif di beberapa obyek wisata seperti Taman Balekambang, Museum Keris Nusantara, Museum Batik Danar Hadi, dan *Jurug Solo Zoo*.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kota Surakarta dalam pemenuhan kebutuhan sarana aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas adalah: (i) tidak semua destinasi pariwisata berada dalam pengelolaan Dinas Pariwisata, misalnya Wayang Orang Sriwedari yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini secara langsung membatasi kewenangan Dinas Pariwisata hanya sebatas melakukan promosi saja; (ii) destinasi pariwisata yang merupakan benda/bangunan cagar budaya sulit untuk dilakukan pembangunan fisik sarana aksesibilitas. Pembangunan RAM, jalur pedestrian, marka dan bangun fisik lainnya harus memperhatikan ketentuan peraturan

benda/bangunan cagar budaya agar tidak merusak atau mengurangi *local wisdom* yang tersedia; dan (iii) anggaran masih menjadi permasalahan klasik dalam implementasi kebijakan.

Fakta empiris sebagai parameter implementasi kebijakan pariwisata di Kota Surakarta dilihat dari terpenuhinya standar pembangunan sarana aksesibilitas bagi wisatawan difabel. Fakta empiris dalam hal ini adalah mencocokkan dan meneliti kesesuaian antara peraturan kebijakan dengan implementasinya di lapangan.

Adapun dalam implementasi kebijakan berupa pembangunan sarana aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas di Kota Surakarta, harus berpedoman dan memenuhi beberapa parameter. Hal ini merupakan salah satu kelemahan implementasi kebijakan pembangunan sarana aksesibilitas karena belum mempunyai parameter baku. Selama ini pembangunan fisik sarana aksesibilitas hanya berpedoman pada PERMEN PU No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, namun belum ada koordinasi yang mengarah pada penyusunan pedoman pembangunan sarana aksesibilitas di lingkungan atau lokasi pariwisata.

Secara normatif menurut Irfan (2017), sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas diklasifikasikan menjadi dua macam. Pertama, aksesibilitas fisik yang diatur dalam PERMEN PU No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan

Gedung dan Lingkungan, berupa persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan, termasuk ruang terbuka dan penghijauan yang dipergunakan dan/atau dikunjungi orang, khususnya agar mudah diakses oleh lansia dan penyandang disabilitas. Permen ini mengatur komponen bangunan dan lingkungan berupa: (1) ukuran dasar ruang; (2) jalur pedestrian; (3) jalur pemandu; (4) area parkir; (5) pintu; (6) ram; (7) tangga; (8) lift; (9) lift tangga (*stairway lift*); (10) toilet; (11) pancuran; (12) wastafel; (13) telepon; (14) perlengkapan dan peralatan kontrol; (15) perabot; dan (16) rambu dan marka.

Kedua, menurut M. Syafi'ie (2014), aksesibilitas non fisik, terkait bagaimana informasi, komunikasi dan teknologi dapat digunakan atau dipahami penyandang disabilitas. Aksesibilitas non fisik harus merespon kebutihan penyandang disabilitas berupa: (1) akses ketersediaan informasi yang dapat dipahami oleh penyandang disabilitas rungu, *low vision/* netra atau kesulitan belajar (*learning disability*); (2) membuat informasi yang lebih aksesibel dengan memodifikasi bentuk media informasi dalam format tertentu, seperti mencetak dalam *font* besar agar dapat diakses oleh individu *low vision*; (3) memberikan layanan "*communication support*", supaya penyandang disabilitas lebih memahami informasi yang ada, seperti membacakan teks tertentu untuk tuna netra, menggunakan catatan atau tulisan ketika berkomunikasi dengan penyandang rungu wicara, menyediakan alat bantu dengar adaptif di bioskop dan sebagainya.

Terkait dengan kondisi lapangan obyek wisata di Kota Surakarta berdasarkan lokasi studi, maka pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dapat diklasifikasikan menjadi: (i) kebutuhan sarana aksesibilitas area dalam (*in door*); dan (ii) kebutuhan sarana aksesibilitas area luar (*out door*). Oleh karenanya, penulis menginventarisir parameter sarana aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas di Kota Surakarta harus memenuhi unsur: (1) ukuran dasar ruang, (2) jalur pedestrian, (3) jalur pemandu, (4) area parkir, (5) ramp, (6) rambu dan marka, dan (7) *lavatory*, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Variabel dan Indikator Penelitian

VARIABEL	INDIKATOR
Ukuran Dasar Ruang	Ukuran ruang ke depan-atas-samping min 180cm
Jalur Pedestrian	- Jauh dari lalu lintas kendaraan - Memiliki jalur lamdai - Tidak licin - Dapat dilewati dua jalur tanpa terjadi benturan
Jalur Pemandu	- Menyediakan jalur pemandu dengan tekstur ubin sesuai kriteria - Berdekatan dengan kursi taman, tempat sampah, dan telepon umum - Menuju elemen seperti toilet umum, ramp, parkir dan rambu atau marka
Area Parkir	Parkir khusus difabel yang itandai dengan adanya marka khusus
Ramp	Memiliki kelandaian yang tidak terlalu tajam
Rambu dan Marka	- Menunjukkan arah fasilitas bagi difabel - Ditempatkan bebas pandang tanpa penghalang - Pencahayaan yang baik - Tidak mengganggu arus pejalan kaki
Lavatory	Design toilet khusus untuk difabel

Dari ketentuan variabel di atas, kemudian diimplementasikan ke kondisi lokasi penelitian,

yaitu Taman Balekambang, Museum Keris Nusantara, Museum Batik Danar Hadi, dan *Jurug Solo Zoo*, sehingga didapat fakta lapangan sebagai berikut:

Tabel 3. Fakta Lapangan

VARIABEL	TAMAN BALE KAMBA NG	MUSEUM KERIS NUSANTARA	MUSEUM BATIK DANAR HADI	JURUG SOLO ZOO
Ukuran Dasar Ruang	Sudah sesuai	Sudah sesuai	Sudah sesuai	Sudah sesuai
Jalur Pedestrian	Sudah sesuai	Sudah sesuai	Jalur yang dilewati masih terkesan sempit, terutama bagi pengguna kursi roda.	Ada beberapa jalur yang tidak bisa dilewati 2 arah
Jalur Pemandu	Hanya ada di area parkir dan area depan taman	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Area Parkir	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Ramp	Sudah tersedia, tetapi masih kurang di beberapa area	Sudah sesuai dan tersedia di semua area	Tidak tersedia	Sudah tersedia, tetapi masih kurang di beberapa area
Rambu dan Marka	Sudah tersedia, tetapi masih kurang di beberapa area	Sudah sesuai	Tidak ada	Sudah tersedia, tetapi masih kurang di beberapa area
Lavatory	Sudah tersedia, tetapi cuma ada di area pintu masuk.	Sudah sesuai	Tidak ada	Sudah sesuai

Berdasarkan parameter normatif substansi perundang-undangan dan fakta empiris, maka hasil analisis kebijakan pariwisata di Kota Surakarta ditinjau dari parameter aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas sudah terpenuhi namun implementasinya di lapangan sebagian besar masih banyak yang belum sesuai dengan kebijakan tersebut sehingga masih memerlukan berbagai tindakan penyempurnaan.

B. Bentuk Ideal Kebijakan Pariwisata Bagi Wisatawan Penyandang Disabilitas Di Kota Surakarta

Pembahasan kedua bertujuan menemukan bentuk ideal kebijakan pariwisata bagi wisatawan penyandang disabilitas di Kota Surakarta. Perumusan ini didasarkan kepada fakta empiris pemenuhan atau ketersediaan sarana aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas yang menjadi parameter.

Bentuk ideal ini sebagai proyeksi aturan konkret yang mengatur terjaminnya sarana aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas di Kota Surakarta. Selama ini, pembangunan aksesibilitas difabel hanya mengacu pada PERMEN PU No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Aturan ini belum secara spesifik menguraikan kepentingan destinasi pariwisata, permasalahan jika obyek wisata berupa benda/cagar bangunan, wisata alam maupun wisata budaya. Oleh karena itu, diperlukan bentuk ideal kebijakan pariwisata bagi wisatawan penyandang disabilitas di Kota Surakarta. Bentuk ideal kebijakan ini dapat diwujudkan secara konkret dalam bentuk peraturan daerah Kota Surakarta.

Adapun bentuk ideal yang dimaksud, bahwa dalam kebijakan pariwisata tersebut harus responsif terhadap kebutuhan sarana aksesibilitas wisatawan penyandang disabilitas sehingga keterbatasan yang ada dapat diakomodir secara nyata berupa implementasi kebijakan yang dimaksud. Sisi responsif yang mengakomodir kebutuhan sarana aksesibilitas wisatawan penyandang disabilitas diinventarisir sebagai berikut:

1. Menyamakan visi dan arah kebijakan *Stakeholder* kepariwisataan Kota Surakarta (Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan serta Dinas Pembangunan Umum) dalam pembangunan sarana aksesibilitas wisatawan difabel

Penyamaan visi dan misi diperlukan untuk menyeragamkan rangkaian kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk menyeragamkan arah kebijakan mulai dari tahap perencanaan, implementasi, monitoring dan pengawasan sampai pada evaluasi kebijakan.

2. Membuat parameter baku pembangunan fisik sarana aksesibilitas khusus untuk destinasi pariwisata bagi wisatawan penyandang disabilitas

Kelemahan terbesar dalam membangun sarana aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas, adalah belum adanya parameter baku. Selama ini parameter baku hanya berpedoman kepada PERMEN PU No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

3. Menambahkan sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sensorik dan penyandang disabilitas intelektual

Pemenuhan sarana aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas di Kota Surakarta masih terbatas kepada penyandang disabilitas fisik, belum mencakup penyandang disabilitas sensorik dan intelektual. Hal ini untuk memungkinkan adanya wisatawan atau researcher penyandang disabilitas sensorik

yang semisal ingin melakukan penelitian di Museum atau destinasi wisata sejarah, hal ini perlu diperhatikan pemenuhan sarana aksesibilitasnya.

4. Memantau dan mengawasi pembangunan jalur pedestrian dan jalur pemandu sebagai lajur utama penyandang disabilitas sehingga tidak ditemukan mal-fungsi.

Jalur pedestrian sejatinya dipakai sebagai jalur utama pejalan kaki, namun masih ada yang menggunakan jalur tersebut dengan merubah fungsinya. Urgensi jalur pedestrian bagi penyandang disabilitas adalah memisahkan antara penyandang dengan keramaian supaya mempermudah aksesibilitas

5. Mengadakan audiensi temporer kepada komunitas difabel Kota Surakarta. Audiensi perlu dilakukan sebab dapat menjadi pandangan terhadap kebutuhan wisatawan penyandang disabilitas terhadap sarana aksesibilitas di lokasi wisata Kota Surakarta.

Ketersediaan sarana aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas di lokasi studi yang belum lengkap, menjadi indikator implementasi kebijakan pariwisata apakah sudah responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas atau belum. Implikasinya terletak pada terhambatnya kemandirian dan menyebabkan lingkungan pariwisata yang tidak ramah difabel. Aksesibilitas pada dasarnya disediakan untuk mewujudkan kemandirian dan menciptakan lingkungan binaan yang ramah bagi semua orang, termasuk penyandang cacat

sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Implikasi lainnya adalah ketidakmampuan pemerintah dalam pemenuhan hak difabel menyebabkan pemikiran adanya diskriminasi terhadap kaum difabel.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Analisis kebijakan pariwisata di kota Surakarta ditinjau dari parameter aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas sudah dipenuhi dengan adanya Perda Kota Surakarta No. 13 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2026, yang secara spesifik mengatur aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas. Hal ini didukung dengan implementasi kebijakan pembangunan sarana aksesibilitas di Taman Balekambang, Solo Zoo, Museum Keris dan Museum Danarhadi, meskipun belum sepenuhnya terpenuhi.
2. Bentuk ideal kebijakan pariwisata bagi wisatawan penyandang disabilitas di kota Surakarta dapat diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota yang responsif terhadap kebutuhan aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas dengan jalan: (i) Menyamakan visi dan arah kebijakan Stakeholder kepariwisataan Kota Surakarta (Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan serta Dinas Pembangunan Umum) dalam pembangunan sarana aksesibilitas wisatawan difabel; (ii) Membuat

parameter baku pembangunan fisik sarana aksesibilitas khusus untuk destinasi pariwisata bagi wisatawan penyandang disabilitas; (iii) Menambahkan sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sensorik dan penyandang disabilitas intelektual; (iv) Mengadakan audiensi temporer kepada komunitas difabel Kota Surakarta; dan (v) Mengadakan audiensi temporer kepada komunitas difabel Kota Surakarta.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia,
- Haryanti, Rina H dan Sari, Candra, (2017), "Aksesibilitas Pariwisata Bagi Difabel di Kota Surakarta (Studi Evaluasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan)," *Spirit Publik*, Vol. 12 (1), hlm. 85-96.
- Irfan, *et. al.*, (2017), "Kajian Aksesibilitas Kaum Difabel Pada Gedung Pasar Aceh Berdasarkan Persepsi Masyarakat, Lansia dan Penyandang Cacat," *Jurnal Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1 (2), hlm. 533-542.
- Kurniawan, Harry, *et. al.*, (2017), *Perancangan Aksesibilitas Untuk Fasilitas Publik*," Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Ridwan, Muhamad. 2012. "Perencanaan Pengembangan Pariwisata. Medan: Sofmedia
- Syafi'ie, M, (2014), "Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas", *Jurnal Inklusi*, Vol. 1 (2), hlm. 269-290.
- Yoeti, Oka A. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita